KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kunjungan Kerja : Ubah Metode Pembayaran Uang Dinas
Tanggal : Senin, 16 Mei 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KUNJUNGAN KERJA

Ubah Metode Pembayaran Uang Dinas

JAKARTA, KOMPAS — Munculnya dugaan penyelewengan dana kunjungan kerja anggota DPR perlu mendapat perhatian serius dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah sebaiknya mengubah metode pembayaran kunjungan kerja kedinasan dari dibayarkan sekaligus untuk semua kebutuhan (lumsum) menjadi penggantian sesuai pengeluaran selain uang dinas harian (*reimburse*).

Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi, Minggu (15/5), di Jakarta, mengatakan, perubahan metode pembayaran uang perjalanan dinas dapat mencegah peluang penyelewengan. Pasalnya, setiap orang yang melakukan perjalanan dinas menggunakan uang negara harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan.

Usulan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenni Sucipto. Menurut Yenni, metode pembayaran uang perjalanan dinas negara secara lumsum harus segera diubah. "Model ini tidak akuntabel," katanya.

Selain itu, Fitra juga mendorong semua fraksi DPR menghukum anggotanya yang tidak menyerahkan laporan kunjungan kerja berupa laporan keuangan dan program kegiatan.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibiayai negara selama ini relatif lemah. Mereka yang melakukan perjalanan dinas atas biaya negara wajib menstempel surat perintah perjalanan dinas di tempat tujuan lalu menyertakan bukti-bukti pengeluaran.

Fraksi-fraksi DPR memperketat bentuk pertanggungjawaban kunjungan kerja anggotanya. Pengetatan laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja salah satunya dilakukan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN). Selain melaporkan kunjungan kerja ke Sekretariat Jenderal DPR, semua anggota F-PAN juga diwajibkan menyerahkan laporan kepada fraksi.

Bukan hanya itu, F-PAN juga melakukan verifikasi laporan kunjungan kerja yang diserahkan anggota. F-PAN meneliti apakah kegiatan selama kunjungan kerja yang dilaporkan benar-benar dilaksanakan atau tidak.

"Administrasi kunjungan kerja sekarang ini lebih ketat dibandingkan dengan periode lalu," kata Wakil Ketua F-PAN DPR, Viva Yoga Mauladi.

Selain harus ada bukti berupa foto, kunjungan kerja juga harus diliput dan diberitakan media massa. Bukti lain yang harus diserahkan anggota adalah tanda tangan kepala desa atau otoritas lain di daerah pemilihan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) juga sangat ketat menuntut anggota membuat laporan kunjungan kerja secara lengkap. "Sejak awal periode, pimpinan F-PKS sudah menyampaikan surat resmi kepada semua anggota berisi perintah agar menyampaikan laporan reses secara lengkap," kata Ketua F-PKS DPR Jazuli Juwaini.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) juga meyakini tidak ada anggota yang melakukan kunjungan kerja fiktif. Semua anggota F-Gerindra wajib menjalankan program partai, selain menjaring aspirasi masyarakat selama reses.

"Program itu seperti diklat kader, pendirian klinik, dan pembentukan koperasi. Itu semua langsung dimonitor DPP dan fraksi," kata Wakil Ketua F-Gerindra DPR Sufmi Dasco Ahmad. (NTA)